

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS SILIWANGI
TASIKMALAYA
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
PEMINATAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN
2023**

ABSTRAK

ELISTA ITA YUSTIKA

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)
DI SMAN 2 MAJALENGKA**

Kawasan Tanpa Rokok ditetapkan oleh pemerintah agar kualitas hidup masyarakat meningkat. Peraturan ini sudah mulai diterapkan di berbagai daerah, salah satunya Kabupaten Majalengka melalui Peraturan Bupati Majalengka nomor 4 tahun 2021. Namun capaian target KTR ini masih belum maksimal di Kabupaten Majalengka, khususnya di tatanan sekolah. Penelitian ini mengulas mengenai Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di SMA Negeri 2 Majalengka. Dalam melaksanakan kajian Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) ini, peneliti menggunakan teori gabungan dari George Edward III dan G. Shabbir Cheema dan Denis A. Rondinelli, dimana terdapat 6 variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, kondisi lingkungan dan hubungan antar organisasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun instrument penelitian yang digunakan yaitu pedoman umum wawancara, lembar observasi, lembar telaah dokumen, dan peneliti sendiri. Sumber data penelitian didapatkan dari hasil wawancara dari wakil kepala sekolah, guru BK, kepala UKS, wali kelas, satpam dan siswa/I SMAN 2 Majalengka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor komunikasi dalam implementasi Kawasan Tanpa Rokok di SMAN 2 Majalengka sudah baik, namun faktor lainnya yakni sumber daya, kondisi lingkungan, dan hubungan antar organisasi beberapa sudah terlaksana meski belum maksimal secara keseluruhan. Kemudian terdapat 2 faktor yang sama sekali belum terlaksana yakni faktor disposisi dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan sekolah dapat membentuk satuan tugas Kawasan Tanpa Rokok dalam bentuk Surat Keputusan, mempertegas pemberian sanksi terhadap pelanggar Kawasan Tanpa Rokok supaya merata, mengalokasikan sebagian dana, menyusun SOP serta melakukan evaluasi terhadap program Kawasan Tanpa Rokok yang sudah dilaksanakan.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, kawasan tanpa rokok di sekolah

**FACULTY OF HEALTH SCIENCES
SILIWANGI UNIVERSITY
TASIKMALAYA
PUBLIC HEALTH STUDY PROGRAM
HEALTH ADMINISTRATION AND POLICY SPECIALIZATION
2023**

ABSTRACT

ELISTA ITA YUSTIKA

***POLICY IMPLEMENTATION OF NO-SMOKING AREA (NSA) AT
SMAN 2 MAJALENGKA***

No-Smoking Area (NSA) are established by the government so that the quality of life of the people increases. This regulation has begun to be implemented in various regions, one of which is Majalengka Regency through Majalengka Regent Regulation number 4 of 2021. However, the achievement of the NSA target is still not optimal in Majalengka Regency, especially in the school setting. This study reviews the Implementation of the No-Smoking Area Policy at SMAN 2 Majalengka. In carrying out this study on the Implementation of Non-Smoking Area (NSA) Policy, researchers used the combined theory of George Edward III and G. Shabbir Cheema and Denis A. Rondinelli, where there are 6 variables that greatly determine the successful implementation of a policy, namely communication, resources, disposition, bureaucratic structure, environmental conditions and inter-organizational relations. This type of research is qualitative research. The research instruments used were general interview guidelines, observation sheets, document review sheets, and the researchers themselves. Sources of research data were obtained from interviews with deputy principals, counseling teachers, UKS heads, homeroom teachers, security guards and students of SMAN 2 Majalengka. The results showed that the communication factors in the implementation of No-Smoking Area at SMAN 2 Majalengka were good, but other factors, namely resources, environmental conditions, and some inter-organizational relationships, had been implemented although not optimal as a whole. Then there are 2 factors that have not been implemented at all, namely the disposition factor and bureaucratic structure. Based on the results of the research, it is hoped that schools can form a Non-Smoking Area regional task force in the form of decree, reinforce the imposition of sanctions on non-smoking area violators so that they are evenly distributed, allocate part of the funds, compile SOP and evaluate the implemented Non-Smoking Area program.

Keywords: *Implementation of policies, no-smoking area in schools*